

**PENDEKATAN KELOMPOK SEBAGAI MODALITAS
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Group Approach As Modalities In Poverty Alleviation)**

Suradi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Email : mas.soeradi@yahoo.co.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat kompleks baik dari faktor sebab maupun akibatnya. Oleh sebab itu, kemiskinan juga bersifat multidimensi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial telah mengembangkan program penanggulangan kemiskinan. Salah satu dari program tersebut adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program ini menggunakan kelompok sebagai pendekatan dalam mengembangkan dan merubah perilaku di kalangan keluarga miskin guna meningkatkan standar kehidupan mereka baik aspek ekonomi maupun sosial. Penggunaan kelompok sebagai modalitas dan strategi perubahan keluarga dan masyarakat mempunyai dasar teori dalam profesi pekerjaan sosial. Oleh karena itu, KUBE harus dipahami sebagai sebuah pendekatan dan strategi untuk perubahan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Kata kunci: kemiskinan, pendekatan, kelompok

Abstract

Poverty is complex sosial problem especially in term of cause and effect factors. That way, poverty also has a multidimensional aspect. Government of Indonesia through the Ministry of Sosial Affairs has develop the Poverty Reducation Program. One of the program is Kelompok Usaha Bersama (KUBE). This program using the group as approach to develop and changed behavior among poor family to improve the standard of living both economic and sosial aspect. Using a group as modalities and strategy for family and community change have theoretical based in sosial work profession. Therefor, KUBE must be understood as an approach and strategy to change and improvement of family welfare.

Key words: poverty, approaches, group

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan berbagai pihak, baik kalangan akademisi, birokrasi, elit politik, maupun praktisi pembangunan. Perdebatan dimaksud masih berkisar pada definisi, indikator, dan data (populasi). Badan Pusat Statistik sebagai lembaga resmi pemerintah yang berwenang mengeluarkan data kemiskinan, tidak luput dari kritik, dan mengundang perdebatan yang berlarut-larut ketika mengumumkan data

penduduk miskin.

Terlepas dari perdebatan yang berkaitan dengan definisi dan data penduduk miskin tersebut, sampai tahun 2011 penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar dibandingkan dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2011 penduduk miskin di Indonesia berjumlah 30,02 juta jiwa atau 12,49 persen. Selanjutnya dilaporkan oleh BPS juga, bahwa penduduk yang hampir miskin berjumlah 72,12 juta jiwa. Sementara itu, menurut Pusat Data dan Informasi

Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos), berdasarkan data tahun 2011 populasi fakir miskin berjumlah 7,76 jiwa. Populasi penduduk miskin, fakir miskin dan hampir miskin tersebut tentu tidak statis. Artinya, kemungkinan besar angka tersebut akan mengalami pergerakan cenderung meningkat, apabila dikaitkan dengan pertumbuhan perekonomian nasional saat ini. Kondisi tersebut ditambah dengan jumlah pengangguran terbuka masih sebesar 8.12 juta (BPS, 2011), terjadinya bencana alam dan bencana sosial di beberapa wilayah di Indonesia.

Selain data kuantitatif yang masih cukup besar, permasalahan terkait dengan kemiskinan yaitu lahirnya berbagai permasalahan sosial. Permasalahan-permasalahan sosial yang berakar dengan kemiskinan, antara lain balita dan anak telantar, anak dengan gizi buruk, anak jalanan, anak yang dieksploitasi diperlakukan salah, diperdagangkan dan dilacurkan, wanita tuna susila, perdagangan perempuan, gelandangan dan pengemis, tindak kekerasan dalam keluarga dan tindakan kriminal dan anarkis. Oleh karena itu, dalam perspektif pekerjaan sosial, kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat multi-dimensional. Dimensi-dimensi di dalam konsep kemiskinan, yaitu berdimensi sosial, budaya, ekonomi, budaya, politik dan hukum. Implikasi dari sifat yang multi-dimensional tersebut, maka penanganan kemiskinan menghendaki pelibatan berbagai ilmu dan keahlian atau multi-disipliner.

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia sesungguhnya diamanatkan oleh para pendiri negara, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, yang berbunyi: "Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara". Berdasarkan amanat tersebut, maka Kementerian Sosial sebagai salah satu instansi pemerintah, mengembangkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Mengingat populasi penduduk miskin masih cukup besar, maka dalam perkembangannya

program-program penanggulangan kemiskinan diselenggarakan oleh 18 kementerian dan lembaga negara. Diharapkan dengan banyaknya instansi pemerintah yang menyelenggarakan program-program penanggulangan kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia cepat terentaskan.

Kesungguhan negara dan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, ditunjukkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Secara jelas tersurat, bahwa di dalam Undang-Undang tersebut Kementerian Sosial diposisikan sebagai *leading sector*. Sebagaimana diketahui, bahwa selama ini penanganan kemiskinan ditangani oleh 18 instansi pemerintah. Oleh karena itu, amanat Undang-Undang tersebut merupakan tantangan yang cukup berat bagi Kementerian Sosial. Posisi *leading sector*, akan mendorong 17 instansi pemerintah yang lain untuk "berkiblat" ke Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan. Namun demikian sangat ironis, meskipun Kementerian Sosial sebagai *leading sector*, hanya memperoleh anggaran APBN sebanyak 0.2 persen dari total anggaran nasional untuk program penanggulangan kemiskinan.

Program Penanggulangan Kemiskinan pada Kementerian Sosial, dilaksanakan dengan pendekatan kelompok, atau yang dikenal dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program ini mengundang kritik dari berbagai pihak, terutama Bappenas - karena sampai saat ini efektivitasnya masih dipertanyakan. Pada Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan: KUBE sebagai Media Peningkatan Kesejahteraan, Keberdayaan dan Kemandirian di Hotel Accacia Jakarta tanggal 5 Oktober 2011, Bappenas mempertanyakan efektivitas KUBE. Pada seminar tersebut, Bappenas menyampaikan laporan hasil uji petik di Kota Kendari, Malang dan Pasuruan. Hasil uji petik menunjukkan, bahwa banyak permasalahan mendasar yang

ditemukan di lapangan seperti distribusi bantuan, pendampingan, pengelolaan usaha dan pengendalian. KUBE dipaksakan diintegrasikan dengan PKH, padahal kedua program tersebut memiliki sasaran dan karakteristik yang berbeda. Karena itu, Bappenas mengeluarkan peringatan yang cukup keras, bahwa skema P2K-KUBE perlu diperbaiki.

Temuan dari uji petik Bappenas tersebut tidak jauh berbeda dengan temuan tim peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial (Suradi dan Mujiyadi, 2009). Penelitian evaluasi yang mengambil sampel lokasi di Kalimantan Barat, Lampung, Sulawesi Utara dan Jawa Timur tersebut, menemukan data dan informasi yang menunjukkan belum efektifnya P2K-KUBE melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dilihat dari aspek konteks, input, proses dan produk. Tim kemudian memberikan rekomendasi, yaitu review konsep dan desain program, penajaman kriteria sasaran, mengoptimalkan supervisi, monitoring dan evaluasi. Namun demikian, hasil penelitian tersebut belum memperoleh respon oleh unit kerja terkait.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teoritis berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dengan model KUBE. Konsep KUBE yang selama ini dipahami sebagai 'media' atau 'wadah' kegiatan usaha dari keluarga miskin, sesungguhnya memiliki pengertian yang lebih luas, apabila dilihat dari perspektif metode pekerjaan sosial.

PEMBAHASAN

Urgensi Pendekatan Kelompok

Kemiskinan bukan semata-mata permasalahan ekonomi, akan tetapi juga permasalahan sosial dan psikologis. Oleh sebab itu, akan timbul kesulitan ketika fenomena kemiskinan diobyektifkan dalam bentuk angka-angka, seperti dalam penentuan garis kemiskinan yang sampai kini masih diperdebatkan. Dengan

demikian, kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan kuantitatif, tetapi juga persoalan-persoalan kualitatif (Nugroho, 1995).

Sesuai dengan isu yang diangkat dalam tulisan ini, maka konsep kemiskinan akan dilihat dari aspek sosio-kultural. Berkaitan dengan aspek sosio-kultural, Soemardjan (1997) mengemukakan, bahwa salah satu tipologi kemiskinan adalah budaya kemiskinan. Istilah kemiskinan budaya adakalanya dipakai secara terbalik menjadi budaya kemiskinan. Kemiskinan budaya adalah tata hidup yang mengandung sistem kaidah serta sistem nilai yang menganggap bahwa taraf hidup miskin yang disandang suatu masyarakat pada suatu waktu adalah wajar dan tidak perlu diusahakan perbaikannya. Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat itu dianggap sudah menjadi nasib dan tidak mungkin diubah, karena itu manusia dan masyarakat harus menyesuaikan diri dari kemiskinan itu, agar tidak merasa keresahan jiwa atau frustrasi serta berkepanjangan. Manusia dan masyarakat menyerah kepada nasib dan bersikap tidak perlu menggunakan sumber daya lingkungannya untuk mengubah nasib itu.

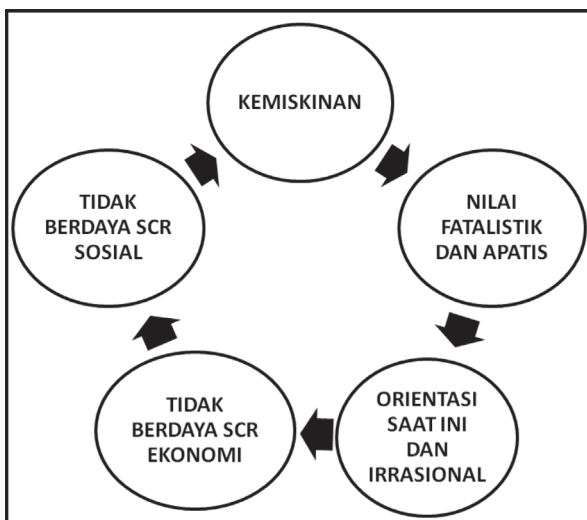
Sejalan dengan pemikiran Soemardjan di atas, Nugroho (1995) mengemukakan, bahwa kemiskinan memiliki dimensi ekonomi atau material, sosial dan budaya, dan struktural atau politik. Menurutnya, pada lapisan masyarakat yang secara ekonomis miskin akan berbentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan dan lain-lain. Kemudian di dalam teori konvensional, kemiskinan terkait dengan faktor-faktor struktural, termasuk "budaya" atau "gaya hidup" malas. Teori-teori itu bahkan sudah menjadi "mitos", sehingga mengilhami sosiolog Syed Husein Alatas menulis buku yang kini sudah menjadi klasik, *The Myth of the Lazy Natives*,

mitos tentang kaum bumi putra pemalas (Azra, 2005),

Paul Horton dan Cheaster I. Hunt (1980) yang dikutip oleh Susanto (1984), mengemukakan beberapa nilai sosial dan budaya yang khas pada rumah tangga miskin, yaitu :

1. Situasi keluarga dengan ibu sebagai fokus kehidupan keluarga, pengelola dan pengendali rumah tangga.
2. Sikap agresif - fisik.
3. Ketidakmampuan merencanakan hari depan dan mengutamakan apa yang dapat dicapai dalam jangka pendek.
4. Sikap memberi reaksi impulsif - emosional.
5. Sikap fatalistik/pasrah terhadap kehidupan masa kini dan masa depan.

Berdasarkan pengertian tentang kemiskinan tersebut, bahwa seseorang menjadi miskin dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural. Faktor tersebut berasal dari dalam diri mereka sendiri, baik sebagai individu, kelompok maupun komunitas. Nilai-nilai yang telah terlembaga cukup lama, akan membentuk siklus atau lingkaran setan (*vircius sirele*) yang menghambat orang miskin keluar dari situasi atau kondisi yang dihadapi. Lingkaran setan kemiskinan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 : Lingkaran Setan Kemiskinan Perspektif Sosio-Kultural

Pengertian Kelompok

Menurut Brigham yang dikutip oleh Wilgino (2006), kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain dan memiliki kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai bersama (*group is two or more people who interest with and influence each other and are ied together by common interest or goals*). Kemudian menurut Bass yang dikutip Shaw (Walgino, 2006), kelompok adalah kumpulan individu-individu yang keberadaan sebagai perkumpulan tersebut memberi manfaat bagi individu-individu (*group is a collective of individuals whose existence as a collection is rewarding to individuals*).

Berdasarkan definisi tersebut, maka di dalam konsep kelompok terdapat beberapa unsur, yaitu individu-individu, interaksi dan saling ketergantungan, ada kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai bersama, serta ada manfaat bagi individu-individu sebagai anggota. Keberadaan kelompok bukan sekadar wadah, tetapi sebagai alat atau agen perubahan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi setiap individu.

Dikemukakan oleh Irfan (2011), bahwa suatu kelompok sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memiliki motif yang sama antara individu satu dengan yang lain. (menyebabkan interkasi/kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama)
2. Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan antara individu satu dengan yang lain (akibat yang ditimbulkan tergantung rasa dan kecakapan individu yang terlibat)
3. Adanya penugasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan serta kedudukan masing-masing.
4. Adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur

interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Kemudian menurut Wibawa (2010), ciri-ciri suatu kelompok sosial adalah :

1. Merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok atau kesatuan manusia yang lain.
2. Memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Kelangsungan hidup kelompok tersebut tergantung pada kesungguhan para anggotanya dalam melaksanakan perannya.
3. Memiliki norma-norma yang mengatur hubungan diantara para anggotanya.
4. Memiliki kepentingan bersama.
5. Adanya interaksi dan komunikasi diantara para anggotanya.

Seseorang bersedia masuk ke dalam kelompok, karena kelompok tersebut diyakini dapat memberikan kepuasan. Dikemukakan oleh Alim (2012), ada beberapa kriteria kelompok yang dapat menimbulkan kepuasan anggotanya, yaitu :

1. *Sosial bonding*, yaitu dimana kelompok tersebut menyenangkan bagi anggotanya. Sehingga anggota tersebut merasa senang menjadi bagian dari kelompok.
2. *Sosial comparison-upward*, yaitu dimana suatu anggota merasa terinspirasi oleh anggota yang lain, sehingga dia dapat melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh anggota yang menjadi inspirasinya.
3. *Sosial esteem*, yaitu terwujudnya suatu harga diri anggota dikarenakan dia telah menjadi satu dengan anggota-anggota yang lain, dari sinilah akan muncul harga diri suatu kelompok.
4. *Sosial learning*, yaitu dimana anggota tersebut merasa mendapat suatu pelajaran yang berarti dalam kelompok yang dimasukinya.

Tetapi terdapat dua kriteria yang kurang dapat memuaskan suatu anggota kelompok

(Alim, 2012). Dua kriteria tersebut adalah :

1. *Sosial control* adalah satu anggota dapat mempengaruhi anggota yang lain. Ketidakmampuan anggota dalam mengambil suatu beban sendiri dalam mempengaruhi, sehingga dia membutuhkan anggota yang lain untuk menanggung beban yang sama, kecuali bila anggota tersebut mempunyai power tersendiri.
2. *Sosial coparison downward* adalah kemampuan individu dalam menghasilkan atau berbuat sesuatu untuk anggota kelompok. Sehingga dia dapat merasakan perasaan lebih baik dari pada anggota yang lain. Karena sesungguhnya bukan satu orang yang merasa lebih baik atas segalanya dalam suatu kelompok, tetapi bagaimana anggota kelompok yang lain dapat memberikan inspirasi untuk dirinya. Sehingga akan muncul suatu kepuasan bagi anggota tersebut.

Fungsi dan Peranan Kelompok

Kelompok dibangun dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap kelompok pada umumnya memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Menjalin hubungan sosial antar anggota dan kelompok. Bagaimana individu dalam suatu kelompok dapat berhubungan sosial tanpa berkomunikasi atau sejauhmana suatu kelompok dapat memelihara hubungan sosial di antara anggota dengan anggota ataupun anggota dengan kelompok.
2. Pendidikan atau edukasi. Hal ini berkaitan dengan pertukaran informasi antar anggota. Melalui fungsi ini kebutuhan anggota akan informasi dapat terpenuhi. Dan secara tidak langsung kemampuan para anggota di bidangnya masing-masing dapat membawa pengetahuan baru atau justru membawa keuntungan untuk para anggota lainnya ataupun bagi kelompok.
3. Kemampuan persuasi. Hal ini berkaitan dengan komunikasi yang bersifat ajakan kepada anggota kelompok untuk bersikap dan perilaku orang lain sebagaimana yang

diharapkan. Melalui fungsi ini, anggota kelompok akan memperoleh pengetahuan baru, sehingga secara sadar melakukan perubahan terhadap sikap dan perilakunya sebagaimana diharapkan kelompok. Persuasi ini dapat menciptakan iklim yang positif di dalam kelompok.

4. Pemecahan masalah *problem solving*. Hal ini berkaitan erat dengan jalan-jalan alternatif dari para anggota kelompok untuk memecahkan masalah. Keuntungan *problem solving* dalam kelompok adalah :
 - a. Banyak orang -banyak masukan atau pendapat
 - b. Berkaitan dengan fungsi no. 2. Latar belakang pendidikan yang berbeda memungkinkan pemasukan jalan alternatif dari banyak sudut pandang, sehingga akan lebih bijaksana dalam pengambilan suatu keputusan.
5. Terapi. Hal ini berkaitan dengan pemecahan masalah yang bersifat individual pada anggota kelompok. Individu sebagai anggota kelompok yang memiliki masalah yang sama diminta untuk saling terbuka dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Kelompok ini membutuhkan pemimpin sebagai pengatur atau penengah jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat. (<http://psikologikelompok.wordpress.com>, 2012).

Kemudian menurut Kamanto (1992), fungsi dari kelompok antara lain :

1. Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup.
2. Memudahkan pekerjaan.
3. Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar, sehingga selesai lebih cepat, efektif dan efisien. Salah satunya dengan membagi pekerjaan besar sesuai bagian kelompoknya masing-masing atau sesuai keahlian.

4. Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat.

Berdasarkan fungsi kelompok tersebut, maka secara umum kelompok memiliki sejumlah peranan, yaitu :

1. Memberikan media atau memfasilitasi setiap anggota kelompok untuk melakukan hubungan sosial satu sama lain.
2. Memberikan kesempatan kepada para anggota untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman baru dan sumber-sumber ekonomi.
3. Memberikan iklim yang kondusif, sehingga setiap anggota kelompok memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan pada sikap dan perilakunya sesuai harapan kelompok.
4. Membantu para anggota kelompok untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi, baik masalah yang bersifat individual maupun bersifat kolektif.

Kelompok sebagai Modalitas

Dilihat dari pengaruh langsung yang ditimbulkannya, pendekatan pekerjaan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu langsung (*direct-approach*) dan pendekatan tidak langsung (*indirect-approach*). Pendekatan langsung meliputi pekerjaan dengan individu, pekerjaan dengan kelompok dan pekerjaan dengan organisasi dan masyarakat. Sedangkan pendekatan tidak langsung meliputi kebijakan sosial, penelitian sosial dan administrasi sosial.

Khusus pendekatan kelompok atau lebih dikenal dengan *groupwork*, didefinisikan oleh Skidmore, Thackeray dan Farley yang dikutip oleh Adi (2005), yaitu :

A method of working with people in groups (two or more people) for the enhancement of social functioning and for the achievement of socially desirable goals. Groupwork is based on

the knowledge of people's needs for each other and their interdependence. Groupwork is a methode of reducing or eliminating roadblocks to sosial interaction and for accomplishing sosially desirable purposes.

Menurut definsisi tersebut, *groupwork* adalah sebuah metode yang bekerja dengan orang di dalam suatu kelompok (dua atau lebih orang) untuk peningkatan keberfungsian sosial, dan untuk pencapaian tujuan sosial yang diinginkan. *Groupwork* didasarkan pada pengetahuan tentang kebutuhan masyarakat yang saling ketergantungan satu sama lain. *Groupwork* adalah metode untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan interaksi sosial dan untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan.

Definisi *groupwork* tersebut jauh berbeda dengan pengertian yang dikembangkan pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan maupun Perkotaan, dimana Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang hakikatnya sebagai *groupwork*, hanya merupakan sebuah “wadah” kegiatan sosial dan ekonomi bagi keluarga miskin. Pemahaman ini tentu membawa implikasi, dimana KUBE dalam desain program penanggulangan kemiskinan ditempatkan sebagai tujuan program, dan bukan sebagai metode perubahan sikap dan perilaku sosial keluarga miskin. Hal ini dapat dicermati dari indikator keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan *groupwork* sebagai sebuah metode perubahan, menurut Benyamin, Bessant dan Watts yang dikutip oleh Adi (2005), ada tiga perspektif, yaitu :

1. Perspektif yang berorientasi penyembuhan, adalah bentuk *groupwork* yang didesain untuk memperbaiki atau menyembuhkan suatu disfungsi sosial. Tujuan metode *group work* dengan pespektif ini adalah membantu seseorang untuk belajar berbuat sesuatu yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau

mengatasi masalah yang dihadapi. Jenis dari *group work* yang termasuk dalam perspektif ini, antara lain (a) *sosial control groupwork* dan (b) *therapitec groupwork*.

2. Perspektif resiprokal dikenal juga dengan orientasinya yang bersifat transisional yang menjembatani perspektif remedial dan perspektif tujuan sosial. Disebut transisional karena pada satu sisi perspektif ini terkait dengan upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi individu seperti mereka yang terlibat dalam upaya penyembuhan masalah kecanduan narkoba), di sisi yang lain pendekatan ini juga mengarah pada upaya perubahan sosial. Beberapa jenis dari *groupwork* yang termasuk dalam perspektif ini adalah (a) *selfhelp* dan *independend group in work*, dan (b) organisasional *group work*.
3. Perspektif yang berorientasi pada tujuan sosial merupakan metode *groupwork* yang berorientasi politis atau pembangunan yang progresif yang diarahkan pada upaya pembentukan kesadaran sosial masyarakat. Dalam kelompok ini juga seringkali terdapat asumsi bahwa kelompok yang mereka kembangkan mempunyai tanggung jawab sosial untuk melakukan perubahan sosial kearah kehidupan yang lebih baik. Beberapa jenis metode *groupwork* dengan perspektif ini adalah (a) *community development groupwork*, (b) *conscientation groupwork* atau *liberatory groupwork*, dan (c) *sosial action* dan *sosial movement groupwork*.

Pendekatan kelompok digunakan dalam usaha perubahan, karena kelompok memiliki ciri-ciri dan fungsi yang efektif dalam membantu individu-individu, terkait dengan proses sosialisasi. Pada proses sosialisasi tersebut, antar individu akan terjadi saling belajar sosial yang berkaitan dengan pola pikir (*mindset*), sikap (*attitude*) dan perilaku sosial (*behavior*). Sehubungan dengan itu, pendekatan kelompok sangat tepat untuk digunakan dalam perubahan perilaku sosial orang. Berkaitan dengan itu, Hasugian (2008) mengemukakan,

bahwa pendekatan kelompok atau *groupwork* tepat dilakukan dengan keyakinan, bahwa :

1. Orang yang mempunyai masalah atau status yang sama dapat saling membantu dengan cara yang paling baik.
2. Orang mempunyai tanggungjawab terhadap orang lain.
3. Suatu kelompok dapat menjadi suatu sarana yang efektif untuk membantu para anggotanya agar menerima diri mereka sendiri menurut apa adanya dan memecahkan masalah-masalah, sehingga mereka dapat meningkatkan harga diri mereka.
4. Orang dapat memperoleh kepuasan pribadi dan harga diri karena membantu orang lain.
5. Keyakinan akan pentingnya model peranan dari seorang anggota kelompok yang telah berhasil baik memecahkan masalahnya.
6. Seorang anggota kelompok yang baik akan selalu siap untuk membantu anggota lain kalau diperlukan.

Kelompok seperti tersebut di atas cenderung mengurangi peran pimpinan kelompok. Kelompok ini diorganisasi atas partisipasi kelompok secara demokratis. Para anggota didorong agar mengambil tanggungjawab sebesar mungkin di dalam kelompok. Kemudian strategi dan teknik-teknik umum dari pendekatan kelompok menurut Hasugian (2008) adalah :

1. Memberikan perasaan diterima dan menjadi bagian dari kelompok kepada para anggota.
2. Memberikan dukungan moral dengan pengertian bahwa para anggota mempunyai masalah atau status yang sama.
3. Memberikan kesempatan kepada para anggota agar mengutarakan masalah-masalah mereka, saling membicarakan perasaan-perasaan, menerima nasehat-nasehat tentang pemecahan masalah sosial dari anggota-anggota yang lain.
4. Memberikan model-model peran yang diambil dari anggota kelompok yang telah berhasil baik dalam penanggulangan

masalah-masalah atau situasi-situasi mereka.

5. Memberikan kesempatan kepada para anggota kelompok agar mengadakan hubungan dengan kelompok-kelompok lainnya di dalam masyarakat untuk tujuan peningkatan pemahaman masyarakat dan pelayanan-pelayanan yang terdapat di dalamnya. Kegiatan semacam ini diharapkan juga dapat meningkatkan kepercayaan anggota kepada diri sendiri dan memperkuat loyalitas mereka terhadap kelompok maupun tujuan-tujuannya.

Implementasi Pendekatan Kelompok

Implementasi pendekatan kelompok dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada Program Penanggulangan Kemiskinan (P2K) yang dikembangkan Kementerian Sosial. Pendekatan kelompok yang menjadi icon Kementerian Sosial dimaksud, yaitu Kelompok Usaha Bersama atau lebih dikenal dengan KUBE. Empat kegiatan yang dikembangkan di dalam P2K, yaitu :

1. KUBE penumbuhan (KUBE)

Penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada pengelolaan usaha ekonomis produktif (UEP). Pembentukan KUBE penumbuhan ini melalui beberapa mensimen, yaitu melalui (1) dana dekonsentrasi bersumber APBN, dana bersumber APBD, dan dana bersumber swadaya masyarakat.

2. KUBE pengembangan (KUBE-BLPS)

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan KUBE penumbuhan. Oleh karena itu, syarat utama penerima KUBE pengembangan atau Bantuan langsung Pemberdayaan sosial (KUBE-BLPS) adalah sudah mengelola KUBE penumbuhan. Meskipun demikian, tidak semua KUBE penumbuhan secara otomatis mendapatkan stimulan pengembangan (KUBE-BLPS). Stimulan pengembangan diprioritaskan pada KUBE penumbuhan yang dinilai berkembang, baik dari sisi ekonomi maupun aktivitas sosial.

3. KUBE penguatan (KUBE-LKM)

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari KUBE pengembangan (KUBE-BLPS). Oleh karena itu, syarat utama peserta Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah sudah mengelola KUBE-BLPS. Meskipun demikian, tidak semua KUBE-BLPS secara otomatis mendapatkan stimulan melalui LKM. Stimulan melalui LKM diprioritaskan pada KUBE-BLPS yang memiliki komitmen sebagai anggota LKM, dan jumlahnya minimal 10 KUBE di tingkat kecamatan.

4. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layah Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan rumah dan permukiman yang layak huni bagi keluarga miskin. Kegiatan ini menggunakan mekanisme kelompok, yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 - 10 orang. Setiap keluarga miskin menerima dana bantuan untuk renovasi rumah, dimana pembangunannya dikerjakan secara berkelompok.

Berdasarkan tinjauan teoritis tentang esensi dan urgensi kelompok, maka pendekatan yang ditempuh Kementerian Sosial dalam penanggulangan kemiskinan, sesungguhnya sudah tepat. Permasalahannya, implementasi KUBE ada kesan memaksa keluarga miskin untuk mengelola Usaha Ekonomis Produktif (UEP) secara bersama dalam satu kelompok. Akibatnya, tidak sedikit KUBE yang berhenti di tengah jalan dengan alasan (1) kesulitan mengatur anggota, (2) pembagian hasil tidak adil, (3) biaya operasional lebih tinggi dibandingkan hasil usaha, dan (4) tidak semua anggota memiliki minat terhadap UEP yang dikelola (Suradi dan Mujiyadi, 2009).

Berdasarkan temuan penelitian Suradi dan Mujiyadi (2009) tersebut, maka kelompok atau KUBE tetap dapat digunakan sebagai pendekatan dalam perubahan sikap dan perilaku sosial. Usaha ekonomi tidak dikelola secara kelompok, tetapi dikelola secara individu dengan manajemen

kelompok Anggota KUBE memiliki kewajiban-kewajiban sebagai anggota kelompok, seperti mengikuti pertemuan kelompok, membayar iuran kesetiakawanan sosial, dan kewajiban-kewajiban lain yang sudah disepakati melalui musyawarah dalam kelompok. Sehubungan dengan itu, maka eksistensi pendampingan sosial menjadi sangat penting dan strategis, karena ia akan memfasilitasi anggota kelompok melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial.

KESIMPULAN

Kemiskinan memiliki sifat multi-dimensional, karena di dalamnya meliputi aspek sosial, ekonomi, psikis, budaya, dan politik. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak dapat mengandalkan satu pendekatan dan strategi saja. Tetapi diperlukan berbagai pendekatan dan strategi yang dikembangkan dari berbagai perspektif keilmuan.

Di dalam perspektif pekerjaan sosial, dikenal dengan metode *group work*. Metode ini dikembangkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi individu dengan memanfaatkan potensi dan sumber pada kelompok. Hal ini didasarkan pada hakikat kelompok, yaitu sekumpulan orang yang saling mempengaruhi dan saling memberikan manfaat satu sama lain. Oleh karena itu, KUBE yang dikembangkan dan menjadi icon Kementerian Sosial, sesungguhnya sudah memiliki dasar teoretis. Tetapi pemahaman KUBE masih perlu diperluas, bukan hanya sebagai “wadah” kegiatan, tetapi sebagai pendekatan dan strategi perubahan bagi keluarga miskin ke arah taraf hidup yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Alim, M.B. (2012). *Fungsi Kelompok Untuk Anggotanya*. <http://www.psikologizone.com>, didownload, 9 Februari 2012.
- Azra, A.(2005). *Bangun Pagi dan Kemiskinan*. Republika, 30 Juni 2005.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Data Penduduk Miskin di Indonesia*. Jakarta.
- Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. (2011). *Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan*. Jakarta.
- Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan (2011). *Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perdesaaan*. Jakarta.
- Hasugian, F. *Penerapan Case Work dan Group Work Terhadap Warga Binaan Bekas Hukuman*. Informasi, Nomor 01/2008. Puslitbang Kesos. Jakarta.
- <http://psikologikelompok.wordpress.com>, didownload 9 Februari 2012.
- Irfan. (2011). *Ciri-ciri Kelompok Sosial*. Jakarta. <http://irfan-student.blogspot.com/2011/10/ciri-ciri-kelompok-sosial.html>.
- Nugroho, H. (1995). *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan*, dalam Awan Setya Dewanta dkk (Ed), *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media.
- Soemardjan, S. (1997). *Kemiskinan dalam Persektif Sosiologi*. Jurnal Sosiologi, Jakarta. Ikatan Sosiologi Indonesia.
- Sumodiningrat, G. (2009). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa : Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : PT Alex Media Komputindo Susanto , Astrid, 1985,
- Sunarto, Kamanto. (1992). *Sosiologi Kelompok*. Jakarta. Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Suradi (ed) (2009). *Kemiskinan dan Politik Pembangunan Sosial*, Yogyakarta : Citra Media.
- Suradi dan Mujiyadi.B. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Studi Evaluasi di Empat Provinsi*. Jakarta. P3KS Press.
- Susanto, A. (1984). *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta. Bina Cipta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Wibawa.(2010). *Ciri - Ciri Kelompok Sosial*. <http://wibawa-rian.blogspot.com/2010/10/ciri-ciri-kelompok-sosial.html>.
- Walgino, Bimo, 2006, *Psikologi Kelompok*, Yogyakarta : ANDI press.